



Terpilih Sebagai Desa Percontohan Anti Korupsi, KPK RI Lakukan Observasi di Desa Beru-beru.

MAMUJU – KPK RI menggelar Observasi di Desa Beru-beru, kecamatan Kalukku kabupaten Mamuju, untuk penguatan program anti korupsi di desa. Kamis (2/3/2023).

Menurut ketua tim KPK RI, Nurcahyadi, tujuan Observasi ini untuk memilih salah satu calon percontohan desa anti korupsi di Sulawesi barat ini.

Ia mengatakan, ada 4 Desa di Sulawesi barat yang masuk calon percontohan desa anti korupsi, 2 Desa di Kabupaten Mamasa dan 2 Desa di Kabupaten Mamuju, yaitu Desa Kalepu dan Desa Beru-beru.

Nurcahyadi juga menuturkan, ada 5 indikator yang akan menjadi

penilaian dalam observasi tersebut yaitu penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

Adapun kriteria dan pertimbangan dalam penilaian tersebut, dari 4 desa yang masuk sebagai peserta percontohan desa anti korupsi hanya ada 1 desa yang akan terpilih dan minimal mendapatkan 90 skor.

"Desa yang terpilih nantinya akan mengikuti kegiatan selanjutnya seperti Bintek, Penilaian, monev, dan lainnya," terang Nurcahyadi

Sebelumnya, Nurcahyadi menyampaikan bahwa program desa anti korupsi ini dimulai sejak tahun 2021, berawal dari konsen KPK RI terkait pengucuran dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yang sangat besar yakni sudah mencapai 680 Triliun.

Dari 680 triliun itu, hampir 600 aparat desa yang sudah sekolah di balik jeruji (penjara). Dengan kekuatiran itu sehingga KPK meluncur program desa anti korupsi yang sebelumnya sudah diinisiasi di desa Panggunharjo Yogyakarta tahun 2021. Selanjutnya di tahun 2022 KPK menginisiasi di 10 desa di setiap Provinsi. Sementara di tahun 2023 ini KPK akan menginisiasi di 22 Provinsi, salah satunya provinsi Sulawesi barat yang diikuti 4 desa sebagai calonnya.

Adapun desa yang dipilih mengikuti program desa anti korupsi ini bukan merupakan keinginan pemerintah provinsi atau pihak-pihak tertentu tetapi profil dari KPK atas masukan dari kementerian keuangan, Kementerian dalam negeri, Kementerian desa, dan konsultan independen.

"Alhamdulillah Desa Beru-beru ini salah satu desa yang terpilih" ucap Nurcahyadi. (Sir)